

**ANALISIS PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TERHADAP
TINGKAT PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
(STUDI PADA KPP PRATAMA MALANG SELATAN DAN
KPP PRATAMA BANYUWANGI PERIODE 2009–2013)**

**Dimas Andiyanto
Heru Susilo
Bondan Catur Kurniawan**

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
105030400111041@mail.ub.ac.id

Abstract

One of the efforts that had been made by Indonesia Taxation Authority in order to create fairness in term of the taxation of the personal tax income (WPOP) was the introduction of the non-taxable income (PTKP). This study aims to analyze the changes of the Ministry of Finance's regulation Number PMK-162/PMK.011/2012 concerning the PTKP adjustment toward the growth of the number of the personal taxpayer (WPOP) and the income tax revenue (PPh) on KPP Pratama Malang Selatan and KPP Pratama Banyuwangi. This study used the descriptive qualitative approach. The data analysis on this study used the descriptive statistics, comparison analysis and trend analysis. The result of the analysis shows that the rate of growth of the number of taxpayers is not affected by the change of PTKP, the income tax revenue section 21 in KPP Pratama Malang is affected by the change of PTKP, in contrast in KPP Pratama Banyuwangi, the income tax revenue section 21 is not affected by change of PTKP. However the income tax revenue of the tax income 25/29 is not affected by change of PTKP in both KPP.

Keywords: *Non-taxable income, taxpayer, personal tax income*

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia sejak *Tax Reform* pada tahun 1983 telah menetapkan bahwa pajak akan dijadikan tulang punggung dalam membiayai pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi perpajakan diharapkan dapat mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menyempurnakan kebijakan perpajakan dan sistem perpajakan. Adanya reformasi perpajakan diharapkan potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dioptimalkan dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Reformasi perpajakan ini juga dilakukan agar kualitas pelayanan perpajakan semakin meningkat sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap DJP yang kemudian dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan sekaligus meningkatkan penerimaan Negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan misi untuk menghimpun penerimaan pajak, yang dibawah langsung Menteri Keuangan menetapkan beberapa jenis pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang hingga akhir tahun 2013 jenis pajak tersebut dalam skema realisasi penerimaan pajak menjadi yang terbesar memberikan pemasukan kepada Negara. Sampai pada akhir tahun 2013 Pajak Penghasilan (PPh) memiliki kontribusi terbesar. Seperti terlihat pada tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara dari sektor Perpajakan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara dari sektor Perpajakan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 (Milyar Rupiah)

Penerimaan perpajakan	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Pajak dalam Negeri	694.392	819.752	968.293	1.134.289
PPh	357.045	431.122	513.650	584.890
PPN	230.605	277.800	336.057	423.708
PBB	28.581	29.893	29.687	27.344
BPHTB	8.026	-1	-	-
Cukai	66.166	77.010	83.267	92.004
Pajak Lainnya	3.969	3.928	5.632	6.343
Pajak Perdagangan Internasional	28.915	54.122	47.944	58.705
Bea Masuk	20.017	25.266	24.738	27.003
Pajak Ekspor	8.898	28.856	23.206	31.702

Sumber: *Badan Pusat Statistik*

Direktorat Jenderal Pajak dalam proses menghimpun pajak, menerapkan beberapa aturan dalam menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, beberapa diantaranya adalah biaya jabatan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif pajak berlapis yang dikenakan terhadap penghasilan kena pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) agar tercipta keadilan pada setiap Wajib Pajak dari WP kaya berpenghasilan tinggi sampai dengan WP yang berpenghasilan menengah kebawah selain itu fasilitas tersebut diberikan agar masyarakat tidak terlalu terbebani dengan beban pajak yang harus dibayarnya. Salah satu fasilitas yang diberikan DJP adalah

PTKP, PTKP digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai/karyawan/buruh/ memiliki pekerjaan bebas, yang memiliki penghasilan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan sejak reformasi perpajakan tidak memiliki nilai yang tetap, dari tahun 1983 sampai dengan akhir tahun 2013 batasan penghasilan tersebut terus mengalami perubahan. Penetapan besarnya PTKP tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang setiap waktu semakin meningkat. Ditengah perlambatan ekonomi global kebijakan tersebut diambil agar daya beli masyarakat meningkat. PTKP identik dengan standar biaya hidup, berkurangnya pajak penghasilan diharapkan membuat masyarakat bisa menikmati lebih banyak penghasilannya dalam bentuk konsumsi maupun *saving*/tabungan. Dengan begitu pemasukan dari jenis pajak yang lain seperti PPN (Pajak pertambahan Nilai) dan pajak atas bunga dari *saving*/tabungan akan meningkat.

Apabila terjadi kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka hal ini akan dinikmati oleh masyarakat yang berkerja sebagai karyawan/pegawai, dan buruh mupun WPOP yang memiliki pekerjaan bebas dan/atau wiraswasta. PTKP yang disesuaikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) tersebut berada diatas Upah Minimum Kota (UMK). UMK yang rata-rata masih berkisar antara 1-1,5 juta setiap bulannya (*Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur*) mengakibatkan masyarakat yang bekerja sebagai karyawan/pegawai dan buruh di Jawa Timur melaporkan SPT dengan pajak yang harus dibayar sebesar Rp.0,- atau nihil, apabila penghasilan tersebut telah atau tanpa diakumulasi dengan tunjangan namun tetap dibawah PTKP.

Sebelum diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian PTKP yakni Rp 1.320.000, di Kota Surabaya, Kab Gresik, Kab. Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab. Malang dan Kt. Malang bagi Orang Pribadi yang berprofesi sebagai karyawan/pegawai dan buruh masih berkewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Permasalahan lain setelah mengecilnya pajak yang harus dibayar WP adalah dengan adanya kenaikan PTKP ini dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia pada umumnya bagi Orang Pribadi yang baru berprofesi sebagai karyawan/pegawai dan buruh atau yang belum

memiliki NPWP tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sehingga pertumbuhan Wajib Pajak baru akan mengalami penurunan, dampak yang kemudian akan timbul adalah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi akan mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat masalah yang menarik untuk diteliti yaitu perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdampak terhadap penerimaan negara dari sektorpajak terutama Pajak Penghasilan dan karyawan/ pegawai dan buruh berpenghasilan di bawah Rp 2.025.000,00 yang sebelumnya belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Namun demikian penelitian ini menggunakan data pembayaran PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi, yaitu data pembayaran PPh Pasal 21 masa dan pasal 25/29 pada tahun 2009 s/d 2012 (sebelum diberlakukannya PTKP baru), data pembayaran PPh Pasal 21 masa dan pasal 25/29 pada tahun 2013 (sesudah diterapkannya PTKP baru) dan jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2013.

KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian adalah karena di wilayah malang raya terdapat 4 (empat) wilayah KPP Pratama yang dibagi atas 2 (dua) untuk wilayah kota dan 2 (dua) untuk wilayah kabupaten Malang. Jumlah penduduk di wilayah Malang yang mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk Banyuwangi sebagai Kabupaten terluas di pulau Jawa hanya memiliki 1 (satu) KPP Pratama (Lampiran 1 dan 2).

Berdasarkan realita tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi.**

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak

Subjek pajak penghasilan menurut UU Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan yang terdapat dalam Pasal 2 meliputi: Orang Pribadi, Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Wajib Pajak (WP)

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Stelsel Pemungutan Pajak

Stelsel pajak merupakan tata cara atas pemungutan pajak. System pemungutan pajak dibagi menjadi 3(tiga) sistem (Mardiasmo, 2009:7) yaitu : *Official Assessment system*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*.

Kewajiban WPOP

Sesuai dengan sistem *self assessment*, apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 2 adalah setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan obyektif wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui e-registration di website Direktorat Jenderal Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Undang-Undang Nomor. 28 Pasal 1 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (KUP): "Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya." Orang Pribadi yang berkewajiban memiliki NPWP antara lain :

1. Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan sebagai pegawai atau pensiunan.

2. Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha yang dijalankannya.
3. Suami istri yang mengadakan perjanjian Pisah Harta (PH) Masing-masing pihak harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Suami Istri yang berdasarkan putusan pengadilan negeri mengadakan perjanjian hidup berpisah, tetapi belum bercerai.
5. Orang Pribadi Asing yang mempunyai niat tinggal di Indonesia melebihi 183 (seratus delapan puluh tiga) hari wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6. Kuasa warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang kedudukannya sebagai Wajib Pajak pengganti.

Penghapusan NPWP WPOP dilakukan apabila : Wajib Pajak (WP) meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang, Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil, dan Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah nilai tertentu yang mengurangi penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Besaran PTKP selalu disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi. Yang artinya apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dari pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai/karyawan dan buruh atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. Dibawah ini akan dijelaskan tentang PTKP yang berlaku pada tahun pajak 2009 sampai dengan tahun 2013.

PTKP tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 melalui Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008

1. Rp 15.840.000,- untuk WPOP sendiri
2. Tambahan Rp 1.320.000,- untuk WPOP yang menikah
3. Tambahan Rp 15.840.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
4. Tambahan Rp 1.320.000,- untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak maksimal 3 orang tanggungan

PTKP tahun 2013 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012

1. Rp 24.300.000,- untuk WPOP sendiri
2. Tambahan Rp 2.025.000,- untuk WPOP yang menikah

3. Tambahan Rp 24.300.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
4. Tambahan Rp 2.025.000,- untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak maksimal 3 orang tanggungan.

Seperti yang ditunjukkan pada paragraf sebelumnya bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terus mengalami perubahan dari tahun ketahun, hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang semata-mata untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi agar lebih banyak penghasilan yang dapat digunakan sebagai konsumsi Wajib Pajak. Perlambatan ekonomi global turut mempengaruhi kebijakan dalam menaikkan PTKP. PTKP tidak dapat terlepas dari standar biaya hidup, apabila biaya hidup meningkat maka diperkirakan PTKP juga akan mengalami kenaikan. Penyesuaian PTKP dari tahun yang berlaku di tahun 2009-2012 ke tahun 2013 memiliki selisih sebesar Rp 8.460.000,- bagi Wajib Pajak sendiri dan sebesar Rp 705.000,- bagi Wajib Pajak kawin dan Wajib Pajak yang memiliki tanggungan.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep. 545 Tahun 2003 tentang PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah Pajak yang dikenakan sehubungan dengan imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk dalam pengertian imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pesangon, uang pensiun, bonus, hadiah, uang saku beasiswa, komisi dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan Pasal 25 yaitu ketentuan tentang angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas atau bekerja sebagai wiraswasta/pengusaha untuk setiap bulan selama tahun pajak berjalan. Dasar Hukum PPh Pasal 25 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 29 merupakan pajak penghasilan yang dibayar pada akhir tahun pajak, yaitu selisih antara pajak

penghasilan yang terutang dengan jumlah kredit pajak. Dasar hukum PPh Pasal 29 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, 25, 29 pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi. Oleh sebab itu, penulis menggunakan metode penelitian *Kuantitatif Deskriptif*.

Berdasarkan Jenis Penelitian, Penelitian Kuantitatif Sugiyono (2003:14) adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, Penelitian *Deskriptif* Sugiyono (2003:11) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Berdasarkan tersebut diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian *Kuantitatif Deskriptif*, data yang diperoleh dari penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan

Dalam proses ini, peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di daerah Malang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan Jl. Merdeka Utara No.3, Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi Jl. Adi Sucipto No.27 Banyuwangi.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh)

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tahun mulai berlaku atau ditetapkannya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yaitu tahun 1984 yang diresmikan melalui Undang-Undang PPh No.7 Tahun 1983 sampai dengan tahun 2013 yang deresmikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-162/PMK.011/2012. Penelitian ini menggunakan sampel tahun yaitu tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013, tahun tersebut dipilih dikarenakan pada tahun tersebut adalah perubahan PTKP terbaru pada saat penelitian ini dilakukan, dan juga dikarenakan kedua KPP Pratama tersebut baru diresmikan pada tahun 2007, sehingga dikhawatirkan terjadi kesalahan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak di tahun 2008.

Objek penelitian ini adalah dua Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di wilayah yang berbeda. Objek yang dimaksud adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan

dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.

Berdasarkan jenis data penelitian, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data Sekunder diperoleh dari KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi, diantaranya yaitu ;

1. Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21, 25 dan 29 dari tahun 2009-2013,
2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2009-2013, dan dokumen pendukung lain yang berhubungan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi
2. Teknik Kepustakaan

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Analisis Deskriptif kuantitatif atau statistik deskriptif
Tingkat pertumbuhan dihitung dengan rumus :

$$\text{Tingkat Pertumbuhan} = \left(\frac{WP_n - WP_{n-1}}{WP_{n-1}} \right) \times 100\%$$

2. Analisis Komparatif

Uji beda dengan rumus :

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \text{ (Sugiyono, 197: 2012)}$$

3. Analisis Trend

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis penerapan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak

Uji beda (Lampiran 4.) yang telah dilakukan terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak baru setiap bulan yang mendaftar tahun 2013 di KPP Pratama Malang Selatan lebih sedikit dibandingkan jumlah Wajib Pajak baru yang mendaftar tahun 2012, meskipun demikian belum bisa diambil kesimpulan bahwa perubahan PTKP mengakibatkan penurunan jumlah WPOP yang mendaftar, hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Prtama Malang Selatan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 jumlah pendaftaran WPOP baru cenderung terus mengalami penurunan, namun demikian penurunan tidak secara drastis yakni sebesar 7% di tahun 2012 yaitu dari 5.331 menjadi 4.974 WPOP baru yang mendaftar di tahun 2013. Artinya perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (kenaikan) tidak mengakibatkan penurunan jumlah WPOP baru yang mendaftar. Pernyataan ini juga didukung oleh tingkat pertumbuhan WPOP baru yang terjadi di KPP Pratama Banyuwangi, berbeda yang terjadi di KPP Pratama Malang Selatan yang terus mengalami penurunan tingkat pertumbuhan, pada tahun 2013 di KPP Pratama Banyuwangi justru mengalami kenaikan jumlah WPOP baru sebesar 17% dari tahun 2012 yaitu dari 7.681 menjadi bertambah sebesar 8.960 WPOP baru. Artinya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak berdampak besar terhadap pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Suranta (2006) dengan judul “Pengaruh Perubahan Penghasilan tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Penerimaan Pajak” dengan hasil analisis perbandingannya menyatakan bahwa pengaruh perubahan (kenaikan) Penghasilan Tidak Kena Pajak ternyata tidak menurunkan realisasi penerimaan pajak dan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Meskipun diketahui bahwa dengan perubahan PTKP menjadi lebih tinggi yang berada dibawah Upah Minimum Kota (UMK) menjadikan kewajiban untuk mendaftarkan diri bagi karyawan, pegawai, buruh dan bagi wiraswasta menjadi lebih longgar dikarenakan tidak ada kewajiban bagi mereka yang memiliki penghasilan dibawah PTKP untuk memiliki NPWP.

Pada tahun 2009 ketahun 2010 jumlah WPOP baru yang mendaftar mengalami penurunan drastis, hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2009 terjadi pendaftaran masal. Berlakunya UU Nomor 36 Tahun 2008 Melalui Pasal 21 ayat (5a), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1a), bagi Wajib Pajak yang dikenai pemotongan PPh pasal 21 namun tidak memiliki NPWP, maka bagi mereka akan dikenai pemotongan 20% lebih tinggi dari tarif normal. Pemotongan lebih tinggi tersebut diberikan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri yang mulai berlaku tanggal 1 januari 2009. Sehingga mereka yang tidak ingin terkena sanksi pembayaran pajak penghasilan lebih tinggi 20% harus memiliki NPWP.

Pendaftaran WPOP baru juga disebabkan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan manfaat dari memiliki NPWP. Bagi masyarakat yang memiliki NPWP meskipun penghasilannya dibawah PTKP mendapatkan manfaat tertentu seperti kemudahan pengurusan administrasi dalam pengajuan kredit bank, pembuatan rekening Koran di Bank, pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pembayaran Pajak Final, Pembuatan Paspor, mengikuti lelang di instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD. Akibatnya bagi masyarakat yang belum memiliki NPWP yang ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk melakukan kegiatan administrasi tersebut harus memiliki NPWP meskipun memiliki penghasilan dibawah PTKP. Hal ini adalah salah satu cara yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka untuk melakukan Ekstensifikasi Wajib Pajak selain melalui sensus pajak.

2. Analisis tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi

Terkait tingkat pertumbuhan pada KPP Pratama Malang Selatan dengan KPP Pratama Banyuwangi, dari uji beda (Lampiran 4) dan grafik (Lampiran 5) yang telah dilakukan oleh

peneliti, pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda. Pada KPP Pratama Banyuwangi tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak lebih cepat dibandingkan dengan KPP Pratama Malang Selatan. KPP Pratama Malang Selatan pertumbuhan rata-rata Wajib Pajak Orang Pribadi perbulan sebesar 1,27%, sedangkan pertumbuhan WPOP di KPP Pratama Banyuwangi rata-rata perbulan sebesar 1,68%. Hal ini terjadi dikarenakan cakupan KPP Pratama Malang Selatan yang hanya mencakup tiga kecamatan dan memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah KPP Pratama Banyuwangi yang meliputi seluruh wilayah kabupaten Banyuwangi dengan memiliki 24 kecamatan dan dengan luas wilayah yang lebih besar. Yang artinya proses ekstensifikasi Wajib Pajak pada KPP Pratama Banyuwangi memiliki ruang yang lebih luas dari pada KPP Pratama Malang Selatan.

3. Analisis penerapan perubahan Penghasilan Tidak Kena (PTKP) Pajak terhadap tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 bagi Orang Pribadi yang bekerja sebagai pegawai, karyawan dan buruh pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2009 hingga tahun 2010 seperti yang terlihat dari grafik (lampiran 5) terjadi penurunan dikarenakan beberapa Wajib Pajak Besar yang memiliki banyak karyawan dari yang sebelumnya Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan berpindah ke KPP Madya sehingga pelaporan PPh Pasal 21 dan pelaksanaan perpajakan yang lain juga ikut berpindah, selanjutnya penerimaan PPh 21 di KPP Pratama Malang Selatan mengalami kenaikan ditahun 2011 sampai dengan tahun 2012, namun mengalami penurunan pada tahun 2013 disaat mulai berlakunya PTKP yang baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan PTKP mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan (Lampiran 3) PPh pasal 21 di KPP Pratama Malang Selatan, dapat dilihat dari realisasi penerimaan PPh pasal 21 yang mengalami penurunan 10% yaitu sebesar Rp 4.559.529.132 (48.278.288.245–43.715.759.113). Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuritomo (2009) dengan judul “Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak” dengan hasil analisisnya menyatakan bahwa kenaikan PTKP berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 21. Penerimaan PPh pasal 21 di KPP Pratama Banyuwangi mengalami kenaikan terus menerus setiap tahun, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, terlihat dari realisasi penerimaan (Lampiran 3.) PPh pasal 21 pada KPP Pratama Banyuwangi mengalami kenaikan 31% yaitu sebesar Rp 19.813.241.905 (82.424.344.737–

62.611.102.832). Dilihat dari realisasi penerimaan dapat diambil kesimpulan bahwa Perubahan PTKP tidak mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan PPh pasal 21 di KPP Pratama Banyuwangi.

Kenaikan PTKP yang seharusnya mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 namun tertutup oleh pembayaran pajak yang dilakukan oleh banyaknya Wajib Pajak Baru yang jumlahnya lebih banyak dari pada Wajib Pajak ditahun sebelum berlakunya PTKP baru, Wajib Pajak Badan maupun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki karyawan/buruh juga mengakibatkan kenaikan PTKP tidak menurunkan realisasi penerimaan, apabila semakin banyak karyawan/buruh yang memiliki penghasilan di atas PTKP ditahun 2013 maka kenaikan PTKP semakin tidak berdampak terhadap realisasi penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama, selain itu kenaikan gaji dan kenaikan UMK (Upah Minimum Kabupaten/ Kota) juga berperan dalam mengurangi dampak kenaikan PTKP terhadap penerimaan PPh 21, hal ini dikarenakan kenaikan gaji dan kenaikan UMK yang hampir terjadi setiap tahun sedangkan kenaikan PTKP hanya terjadi beberapa tahun sekali. Selain penyebab diatas, domisili Wajib Pajak Orang Pribadi dengan tempat kerja juga berakibat terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama, apabila domisili WPOP dan tempat kerja berbeda wilayah KPP maka pembayaran/penyetoran PPh 21 tercatat sebagai penerimaan di KPP dimana tempat kerja terdaftar, sehingga WPOP pada saat pelaporan pajak di KPP wilayah domisili atau tempat tinggalnya hanya melampirkan bukti potong PPh 21-nya tanpa dicatat sebagai penerimaan PPh 21 di KPP Pratama WPOP berdomisili.

Penerimaan PPh pasal 25 dan 29 di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi terdapat perbedaan realisasi penerimaan (Lampiran 3), dimana penerimaan PPh pasal 25 dan 29 di KPP Pratama Malang Selatan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan di KPP Pratama Banyuwangi. Namun demikian pada saat perubahan PTKP tidak mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan kedua KPP Pratama tersebut. Penerimaan PPh Pasal 25 dan 29 di KPP Pratama Malang Selatan tumbuh 2% yakni naik sebesar Rp 186.107.780 (9.676.062.112–9.489.954.332), dan di KPP Pratama Banyuwangi tumbuh sebesar 10% yakni sebesar Rp 494.606.781 (5.390.720.640–4.896.113.866). Hasil yang sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Sri Suranta (2006) tentang “Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Penerimaan Pajak” yang penelitiannya dilakukan di KPP Pratama Surakarta hasil analisisnya adalah bahwa pengaruh perubahan (kenaikan) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ternyata tidak menurunkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau PPh Pasal 25/29

namun sebaliknya dengan adanya perubahan tersebut justru menaikkan realisasi penerimaan pajak dan Penelitian yang dilakukan oleh Nuritomo juga menyatakan bahwa PTKP tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29.

Hal ini dikarenakan pada penghasilan Orang Pribadi yang bekerja sebagai wiraswasta/pekerjaan bebas terdapat kecenderungan penghasilan yang tidak tetap atau fluktuatif. Pajak penghasilan bagi WPOP ini memiliki struktur penghasilan yang beragam. Perubahan PTKP hanya berdampak kepada Wajib Pajak yang memiliki penghasilan rendah, sedangkan bagi Wajib Pajak yang berpenghasilan besar, PTKP memberikan dampak yang kecil. Sehingga jika semakin besar penghasilan Wajib Pajak maka akibat dari kenaikan PTKP yang ditimbulkan akan semakin kecil.

4. Analisis perbedaan tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi

Penerimaan PPh Pasal 21 bagi karyawan, pegawai, dan buruh dan PPh Pasal 25/29 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha/wiraswasta/pekerjaan bebas di KPP Pratama Malang Selatan dan di KPP Pratama Banyuwangi. Penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 di KPP Pratama Malang Selatan berturut-turut sebesar Rp 35.771.176.303, Rp 31.190.582.677, Rp 44.811.027.361, Rp 48.275.288.245, Rp 43.715.759.113, dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan sebesar 0,46%. Sedangkan di KPP Pratama Banyuwangi Penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 berturut-turut sebesar Rp 34.987.021.242, Rp 52.419.695.317, Rp 58.211.427.738, Rp 62.611.102.832, Rp 82.424.344.737 dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan sebesar 19,93%. Terdapat perbedaan realisasi penerimaan maupun tingkat penerimaan PPh Pasal 21 yang cukup besar antara kedua KPP tersebut yakni penerimaan PPh Pasal 21 paling besar terdapat di KPP Pratama Banyuwangi yang dari tahun ke tahun terus konsisten mengalami kenaikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa KPP Pratama Banyuwangi memiliki potensi penerimaan PPh pasal 21 (Karyawan, pegawai, buruh) lebih besar dibandingkan dengan KPP Pratama Malang Selatan.

Salah satu faktor yang mengakibatkan perbedaan penerimaan PPh 21 terjadi dikarenakan jumlah Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Banyuwangi lebih banyak dari pada di KPP Pratama Malang Selatan, tercatat jumlah WP Badan sampai dengan tahun 2013 sebesar 6.185 WP dengan pendaftaran WP ditahun 2013 sebesar 743 sedangkan WP badan di KPP Pratama Malang Selatan sampai dengan tahun 2013 tercatat sebesar 6.022 WP dengan WP baru ditahun 2013 sebesar 403 WP. Perbedaan jumlah WP Badan tersebut mengakibatkan perbedaan jumlah karyawan/buruhnya, sehingga berakibat

pula terhadap penyetoran atau pembayaran PPh Pasal 21.

Penerimaan PPh Pasal 25/29 bagi WPOP yang bekerja sebagai wiraswasta/pengusaha/pekerjaan bebas, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 di KPP Pratama Malang Selatan berturut-turut sebesar Rp 13.068.180.033, Rp 7.410.401.142, Rp 8.470.948.759, Rp 9.489.954.332, Rp 9.676.062.112, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan setiap tahun sebesar negatif 6,84% dengan kata lain di KPP Pratama Malang Selatan justru mengalami penurunan sebesar 6,84%. Sedangkan penerimaan PPh Pasal 25/29 di KPP Pratama Banyuwangi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 berturut-turut sebesar Rp 3.927.951.791, Rp 3.276.370.140, Rp 4.079.934.224, Rp 4.896.113.866, Rp 5.390.720.647. dengan tingkat pertumbuhan penerimaan sebesar 6,78% setiap tahun. Terdapat perbedaan penerimaan antara kedua KPP tersebut, penerimaan PPh Pasal 25/29 terbesar terdapat pada KPP Pratama Malang Selatan, meskipun penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2009 dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Malang Selatan potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang bekerja sebagai pengusaha/wiraswasta/pekerjaan bebas lebih besar dari pada KPP Pratama Banyuwangi.

Dilihat dari keseluruhan penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi baik PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 secara keseluruhan menunjukkan bahwa penerimaan terbesar adalah pada KPP Pratama Banyuwangi meskipun pada tahun 2009 penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan KPP Pratama Malang Selatan akan tetapi pada empat tahun selanjutnya penerimaan dari KPP Pratama Banyuwangi menjadi yang terbesar. Dilihat dari rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan setiap tahun KPP Pratama Banyuwangi memiliki tingkat penerimaan lebih tinggi dibandingkan dengan KPP Pratama Malang Selatan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil Statistik Deskriptif, Analisis Komparatif dan Analisis Trend yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Selatan cenderung mengalami penurunan pendaftar WPOP dari tahun 2009 sampai dengan 2012 saat berlakunya PTKP yang lama dan begitu juga saat berlakunya PTKP yang baru dengan penurunan 7% dari pendaftar baru sebesar 5.330 pada tahun 2012 WPOP baru yang mendaftar menjadi 4.974 orang pendaftar ditahun 2013. Sedangkan di KPP Pratama Banyuwangi justru mengalami kenaikan tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi baru yang mendaftar sebesar 17% yaitu dari 7.681 WPOP baru di tahun 2012 menjadi 8.960 WPOP di tahun 2013. Dengan demikian, hal ini menunjukan

perubahan (kenaikan) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak mengakibatkan penurunan terhadap tingkat pertumbuhan jumlah WPOP baru.

2. Berdasarkan hasil Analisis Komparatif dan Analisis Trend yang dilakukan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang berbeda, di KPP Pratama Malang Selatan pertumbuhan rata-rata perbulan WPOP sebesar 1,27%, sedangkan pertumbuhan rata-rata perbulan di KPP Pratama Banyuwangi sebesar 1,68%. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan WPOP di KPP Pratama Banyuwangi lebih cepat dari pada KPP Pratama Malang Selatan.
3. Berdasarkan hasil Analisis Statistik Deskriptif, Analisis Komparatif, dan Analisis Trend yang dilakukan menunjukkan bahwa perubahan (kenaikan) PTKP mengakibatkan tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (Wajib Pajak karyawan, pegawai, buruh) di KPP Pratama Malang Selatan turun, yang terlihat dari realisasi penerimaan tahun 2013 lebih kecil dari pada tahun 2012 dengan penurunan sebesar 10%, namun sebaliknya di KPP Pratama Banyuwangi, perubahan PTKP tidak mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, realisasi penerimaan pada tahun 2013 justru mengalami kenaikan 30% lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2012. Perubahan PTKP tidak mengakibatkan penurunan terhadap realisasi Penerimaan PPh pasal 25/29 Orang Pribadi (Wajib Pajak yang bekerja sebagai wiraswasta/pengusaha/pekerjaan bebas) di KPP Pratama Malang Selatan dan di KPP Pratama Banyuwangi. Penerimaan PPh pasal 25/29 di KPP Pratama Malang Selatan realisasi pada tahun 2013 naik sebesar 2% dari penerimaan tahun 2012, hal yang sama terjadi di KPP Pratama Banyuwangi yakni realisasi penerimaan PPh pasal 25/29 juga mengalami kenaikan, yaitu sebesar 10% pada tahun 2013 dari penerimaan tahun 2012. Namun demikian dilihat dari laju pertumbuhan penerimaan pada tahun sebelum dan setelah perubahan PTKP menunjukkan bahwa, perubahan PTKP tersebut tidak mengakibatkan laju pertumbuhan penerimaan bulanan PPh Pasal 21 maupun PPh Pasal 25/29 di kedua KPP tersebut melambat.
4. Berdasarkan Analisis Komparatif dan Analisis Trend yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak penghasilan dalam kurun waktu 2009 sampai dengan tahun 2013 yang terjadi di KPP Pratama Malang Selatan lebih lambat dibandingkan dengan KPP Pratama Banyuwangi. Terlihat pada pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 setiap tahun di KPP Pratama Malang Selatan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,46%. Sedangkan di KPP Pratama Banyuwangi rata-rata pertumbuhan setiap tahun sebesar 19,93%.

Terlihat juga pada pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 25/29 setiap tahun di KPP Pratama Malang Selatan yang justru mengalami penurunan penerimaan rata-rata sebesar 6,84%. Sedangkan di KPP Pratama Banyuwangi yang mengalami kenaikan rata-rata setiap tahun 6,78%.

Saran

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan penelitian, maka dapat disampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. KPP Pratama Malang Selatan diharapkan dapat meningkatkan terus jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, karena semakin lama penduduk di Wilayah Malang, wilayah KPP Pratama Malang Selatan pada khususnya akan semakin bertambah, maka perlu dilakukan Ekstensifikasi Wajib Pajak atau perluasan Subjek pajak yang berkala, contohnya dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah KPP untuk mewajibkan semua karyawan memiliki NPWP atau menjadi Wajib Pajak.
2. Saran bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan perpajakan bagi Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan memecah KPP Pratama Banyuwangi menjadi 2, yakni KPP Pratama bagian wilayah utara dan selatan. Wilayah kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah yang mencapai 5,782.40 Km² yang menjadi wilayah kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur. Pemecahan KPP Pratama tersebut diharapkan dapat mengurangi jarak tempuh Wajib Pajak dan memudahkan fiskus dalam rangka melakukan pengawasan Subjek maupun objek pajak di seluruh wilayah kabupaten Banyuwangi.
3. KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi meningkatkan kinerja pelayanan petugas saat menerima laporan pajak dari Wajib Pajak, hal tersebut untuk menghindarkan Wajib Pajak dari sikap malas untuk membayar pajak dikarenakan pelayanan yang kurang baik

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2013. *Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah 2007-2013)*. <http://www.bps.go.id> . (diakses pada tanggal 17 Februari 2014).
- _____. 2012. *Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2)*. <http://www.kpu.go.id> (diakses pada 15 April 2014).
- _____. 2012. *Luas Wilayah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur*. <http://Indosesiadata.co.id>. (diakses pada tanggal 15 April 2014).
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi tahun 2009. Yogyakarta: Andi.
- Nuritomo. 2009. *Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Pada KPP Yogyakarta satu*. Staff

Pengajar. Fakultas Ekonomi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2013

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor : SE-51/PJ/2012 Tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Suranta, Sri. 2006. *Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Penelitian Dosen Muda. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 23 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Lampiran

Lampiran 1. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) tahun 2012

No	Malang Raya				Banyuwangi	
	Kecamatan	Total	Kecamatan	Total	Kecamatan	Total
	Kab. Malang	2.342.983	Kota Malang	753.422	Banyuwangi	1.627.469
1	Donomulyo	62.558	Blimbing	169.379	Pesanggaran	51.216
2	Pagak	43.572	Klojen	101.725	Bangorejo	64.486
3	Bantur	65.329	Kedungkandang	166.526	Purwoharjo	67.757
4	Sumbermanjing wetan	90.057	Sukun	168.829	Tegaldlimo	59.656
5	Dampit	114.928	Lowokwaru	146.963	Muncar	126.864
6	Ampelgading	48.814			Cluring	69.922
7	Poncokusumo	88.921			Gambiran	59.393
8	Wajak	77.088			Srono	89.678
9	Turen	105.442			Genteng	86.144
10	Gondanglegi	91.760			Glenmore	76.505
11	Kalipare	63.931			Kalibaru	73.476
12	Sumberpucung	55.133			Singojuruh	46.008
13	Kepanjen	100.030			Rogojampi	91.757
14	Bululawang	63.235			Kabat	68.857
15	Tajinan	47.377			Glagah	30.677
16	Tumpang	64.364			Banyuwangi	115.156
17	Jabung	54.088			Giri	26.457
18	Pakis	123.851			Wongsorejo	84.952
19	Pakisaji	79.546			Songgon	51.211
20	Ngajung	44.277			Sempu	76.627
21	Wagir	75.664			Kalipuro	90.241
22	Dau	59.271			Siliragung	47.265
23	Karang plosor	69.329			Tegalsari	45.623
24	Singosari	154.387			Licin	27.541
25	Lawang	103.394				
26	Pujon	55.860				
27	Ngantang	53.018				
28	Kasembon	27.988				
29	Gedangan	48.740				
30	Tirtoyudo	58.343				
31	Kromengan	39.059				
32	Wonosari	42.323				
33	Pagelaran	71.306				

Sumber: Data KPU 2012

Lampiran 2. Luas Wilayah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur

No.	Kode	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km2)	Persentase thdp Luas Provinsi (%)
1	3501	Kabupaten Pacitan	1.389,92	2,91
2	3502	Kabupaten Ponorogo	1.305,70	2,73
3	3503	Kabupaten Trenggalek	1.147,22	2,40
4	3504	Kabupaten Tulungagung	1.055,65	2,21
5	3505	Kabupaten Blitar	1.336,48	2,80
6	3506	Kabupaten Kediri	1.386,05	2,90
7	3507	Kabupaten Malang	3.530,65	7,39
8	3508	Kabupaten Lumajang	1.790,90	3,75
9	3509	Kabupaten Jember	3.092,34	6,47
10	3510	Kabupaten Banyuwangi	5.782,40	12,10
11	3511	Kabupaten Bondowoso	1.525,97	3,19
12	3512	Kabupaten SituBondo	1.669,87	3,49
13	3513	Kabupaten Probolinggo	1.696,21	3,55
14	3514	Kabupaten Pasuruan	1.474,02	3,08
15	3515	Kabupaten Sidoarjo	634,38	1,33
16	3516	Kabupaten Mojokerto	717,83	1,50
17	3517	Kabupaten Jombang	1.115,09	2,33
18	3518	Kabupaten Nganjuk	1.224,25	2,56
19	3519	Kabupaten Madiun	1.037,58	2,17
20	3520	Kabupaten Magetan	688,84	1,44
21	3521	Kabupaten Ngawi	1.295,98	2,71
22	3522	Kabupaten Bojonegoro	2.198,79	4,60
23	3523	Kabupaten Tuban	1.834,15	3,84
24	3524	Kabupaten Lamongan	1.782,05	3,73
25	3525	Kabupaten Gresik	1.191,25	2,49
26	3526	Kabupaten Bangkalan	1.001,44	2,10
27	3527	Kabupaten Sampang	1.233,08	2,58
28	3528	Kabupaten Pamekasan	792,24	1,66
29	3529	Kabupaten Sumenep	1.998,54	4,18
30	3571	Kota Kediri	63,40	0,13
31	3572	Kota Blitar	32,57	0,07
32	3573	Kota Malang	145,28	0,30
33	3574	Kota Probolinggo	56,67	0,12
34	3575	Kota Pasuruan	35,29	0,07
35	3576	Kota Mojokerto	16,47	0,03
36	3577	Kota Madiun	33,92	0,07
37	3578	Kota Surabaya	350,54	0,73
38	3579	Kota Batu	136,74	0,29
	3500	Provinsi Jawa Timur	47.799,75	100

Sumber: Indosesiadata.co.id

Lampiran 3. Tabel Realisasi Penerimaan

Tabel TingkatRealisasi Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Malang Selatan

Tahun	PPh 21	Pertumbuhan %	PPh 25/29	Pertumbuhan %
2008	48.897.587.353		16.174.436.995	
2009	35.771.176.303	-26.84	13.068.180.033	-19.20
2010	31.190.582.677	-12.81	7.410.401.142	-43.29
2011	44.811.027.361	43.67	8.470.948.759	14.31
2012	48.275.288.245	7.73	9.489.954.332	12.03
2013	43.715.759.113	-9.44	9.676.062.112	1.96
Rata-rata		0,46		-6,84

Sumber : Data KPP Pratama Malang Selatan yang telah diolah

Tabel TingkatRealisasi Penerimaan PPh WPOP KPP Pratama Banyuwangi

Tahun	PPh 21	Pertumbuhan %	PPh 25/29	Pertumbuhan %
2008	35.141.380.737		4.098.788.977	
2009	34.987.021.242	-0,44	3.927.951.791	-4,17
2010	52.419.695.317	49,83	3.276.370.140	-16,59
2011	58.211.427.738	11,05	4.079.934.224	24,53
2012	62.611.102.832	7,56	4.896.113.866	20,00
2013	82.424.344.737	31,64	5.390.725.607	10,10
Rata-rata		19,93		6,78

Sumber : KPP Pratama Banyuwangi diolah

Lampiran 4. Tabel Uji Beda

Tabel Uji Beda Tingkat Pertumbuhan WPOP di KPP Pratama Malang Selatan

Dicari	Keterangan	Tahun 2012 x ₁	Tahun 2013 x ₂
N	Jumlah yang diteliti	12	12
\bar{X}	Rata-rata	444,17	414,50
S	Simpangan baku	122,4818	123,8147
S ²	Varian	15001,79	15330,09

Sumber : Data KPP Pratama Malang Selatan Diolah

Tabel Uji Beda Tingkat Pertumbuhan WPOP KPP Pratama Banyuwangi

Dicari	Keterangan	Tahun 2012 x ₁	Tahun 2013 x ₂
N	Jumlah yag diteliti	12	12
\bar{X}	Rata-rata	640,08	746,64
S	Simpangan baku	257,046	279,607
S ²	Varian	66072,63	78180,06

Sumber : Data KPP Pratama Banyuwangi Diolah

Tabel Uji Beda Tingkat Pertumbuhan Jumlah WPOP di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi setiap Bulan dalam kurun waktu 2009-2013

Dicari	Keterangan	Malang Selatan X ₁	Banyuwangi X ₂
N	Jumlah yang diteliti	60	60
\bar{X}	Rata-rata	1,27	1,68
S	Simpangan baku	1,381021	1,451057
S ²	Varian	1,90722	2,105565

Sumber : data KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi diolah

Tabel Uji Beda PPh 21 KPP Pratama Malang Selatan

Dicari	Keterangan	Tahun 2012 X ₁	Tahun 2013 X ₂
N	Jumlah yang diteliti	12	12
\bar{X}	Rata-rata	10,74	11,57
S	Simpangan baku	48,68695	53,80585
S ²	Varian	2370,419	2895,07

Sumber : Data KPP Pratama Malang Selatan Diolah

Tabel Uji Beda PPh 25/29 KPP Pratama Malang Selatan

Dicari	Keterangan	Tahun 2012 X ₁	Tahun 2013 X ₂
N	Jumlah yang diteliti	12	12
\bar{X}	Rata-rata	-1,56	1,91
S	Simpangan baku	8,445257	5,717066
S ²	Varian	71,32236	32,68485

Sumber : Data KPP Pratama Banyuwangi Diolah

Tabel Uji Beda PPh 21 KPP Pratama Banyuwangi

Dicari	Keterangan	Tahun 2012 X ₁	Tahun 2013 X ₂
N	Jumlah yang diteliti	12	12
\bar{X}	Rata-rata	39,68	57,16
S	Simpangan baku	145,7944	163,8728
S ²	Varian	21255,99	26854,31

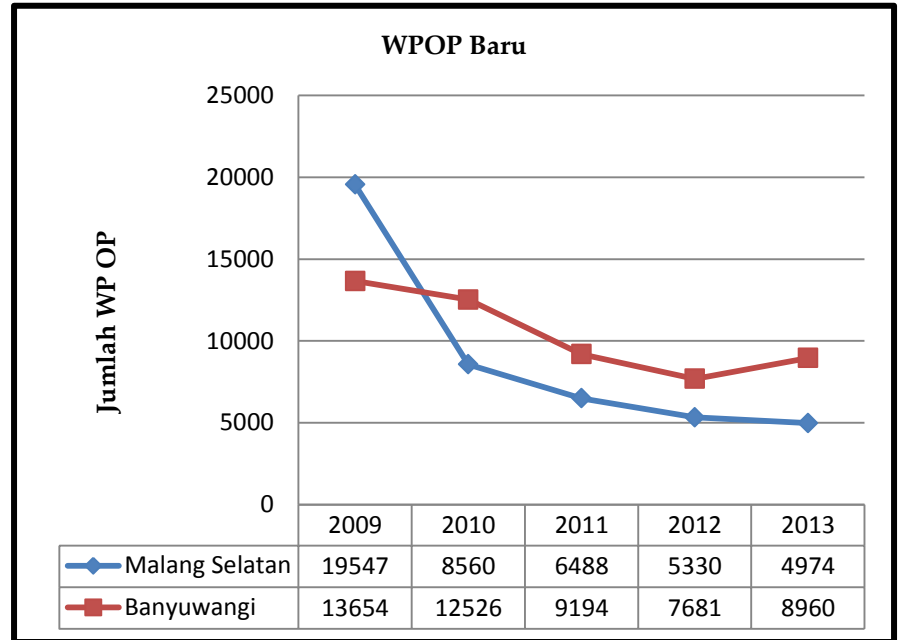
Sumber : Data KPP Pratama Banyuwangi Diolah

Lampiran 4. (Lanjutan)
Tabel Uji Beda PPh 25/29 KPP Pratama Banyuwangi

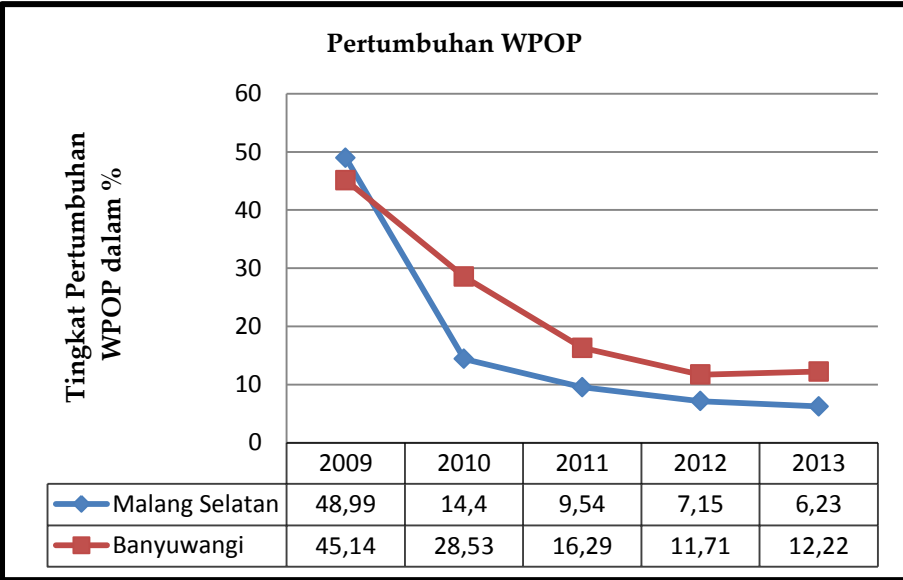
Dicari	Keterangan	Tahun 2012 X ₁	Tahun 2013 X ₂
N	Jumlah yang diteliti	12	12
\bar{X}	Rata-rata	7,80	19,93
S	Simpangan baku	51,77873	67,1303
S ²	Varian	2681,037	4506,477

Sumber : Data KPP Pratama Banyuwangi Diolah

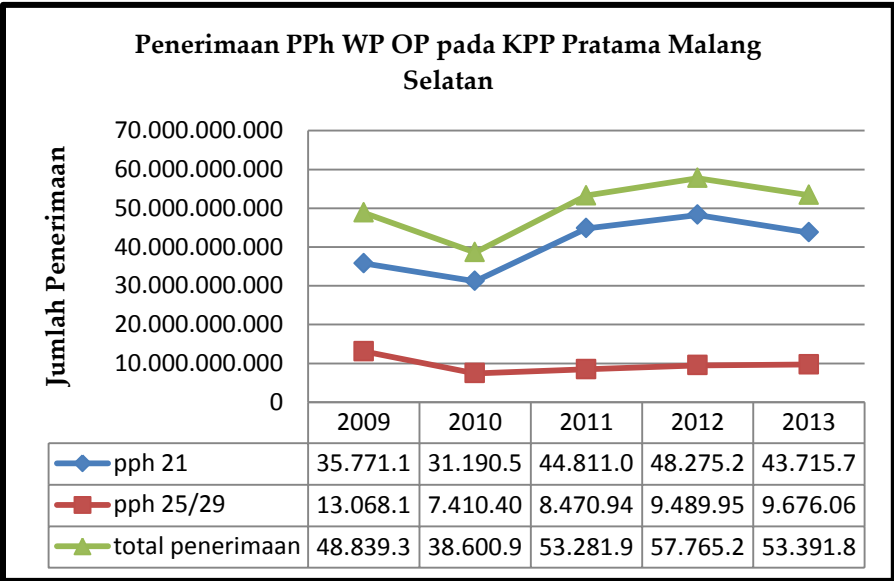
Lampiran 5. Grafik



Sumber: KPP Pratama Banyuwangi dan KPP Pratama Malang Selatan diolah
Grafik WPOP baru yang terdaftar setiap tahun di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi

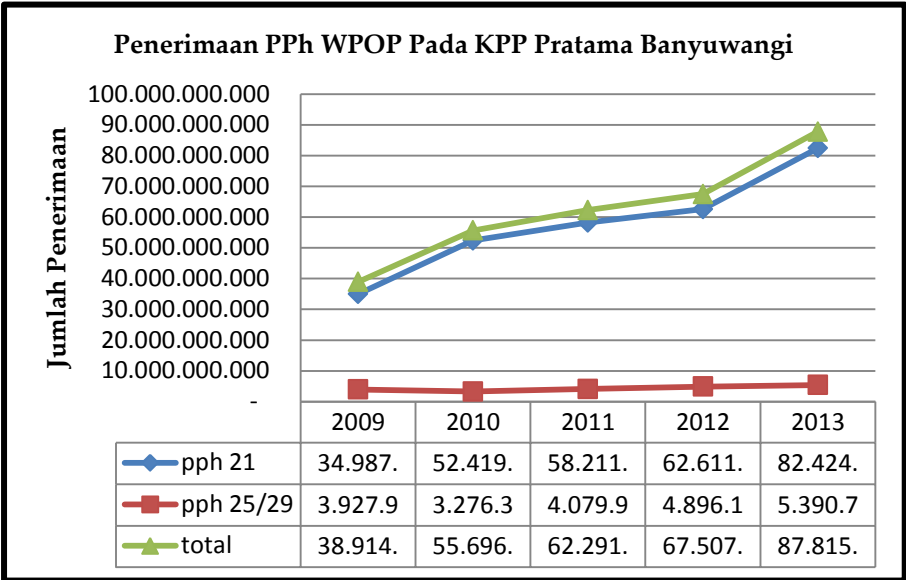


Sumber: KPP Pratama Banyuwangi dan KPP Pratama Malang Selatan diolah
Grafik Tingkat Pertumbuhan WPOP di KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi



Sumber: KPP Pratama Malang Selatan
Grafik Penerimaan PPh WPOP di KPP Pratama Malang Selatan

Lampiran 5. (Lanjutan)



Sumber: KPP Pratama Banyuwangi
Grafik Penerimaan PPh WPOP di KPP Pratama Banyuwangi